



RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN
SAMPANG 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu :

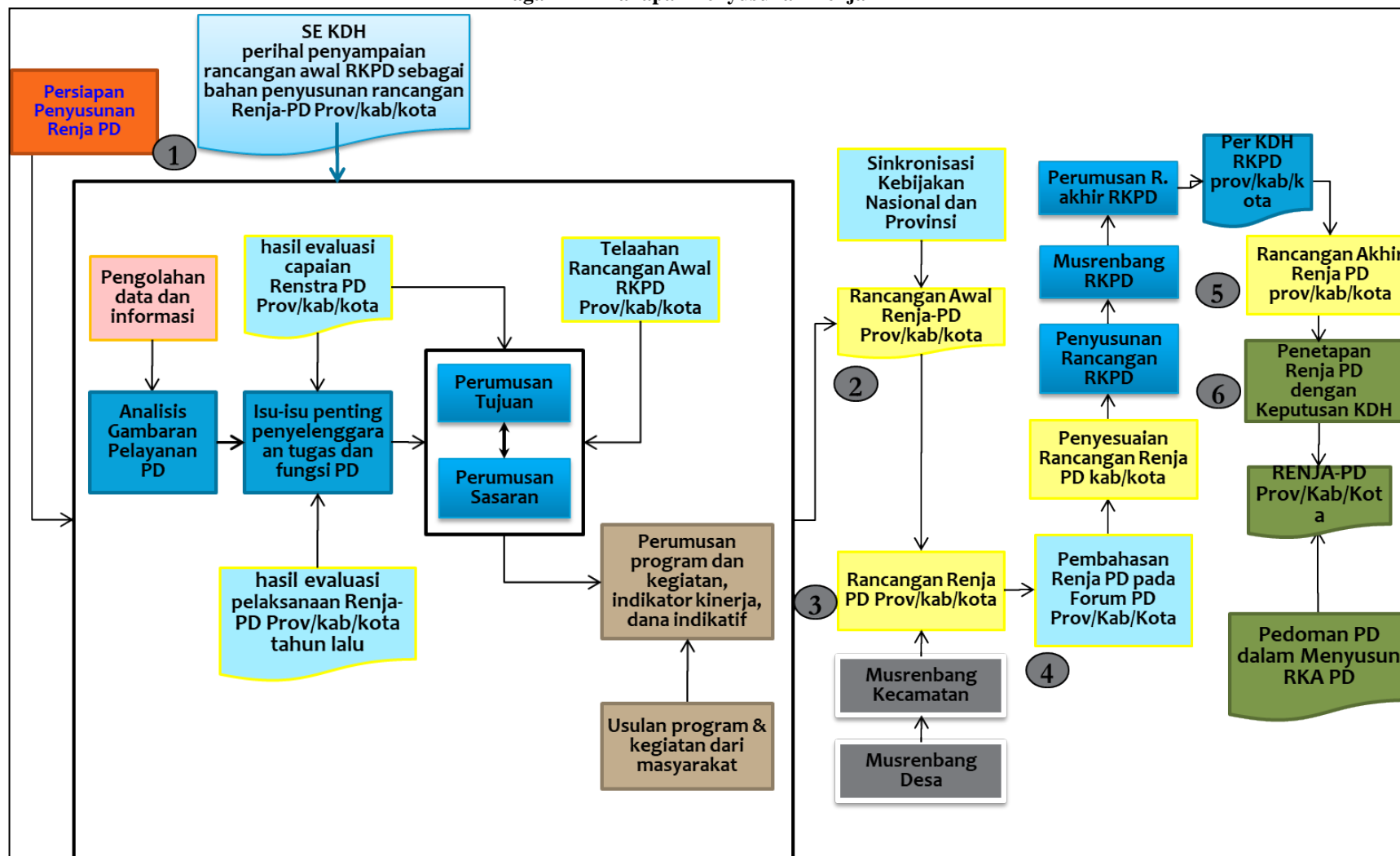
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- e. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**.

Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),

-
- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).

38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Operasional dan Belanja Modal beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2020 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-pertama pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Sekretariat DPRD.

Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2020, total anggaran belanja tahun 2020 adalah sebesar Rp. 45.645.462.175,00. (45 Milyar 645 Juta 462 Ribu 175 Rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. 22.130.848.697,00 (22 Milyar 130 Juta 848 Ribu 697 Rupiah) dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. 3.205.601.728,00 (3 Milyar 7205 Juta 601 Ribu 728 Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 20.309.011.750,00 (20 Milyar 309 Juta 011 Ribu 750 Rupiah).

Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.036.982.725,00 (44 Milyar 036 Juta 982 Ribu 725 Rupiah) atau 96,48% terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. 21.303.773.610,00 (21 Milyar 303 Juta 773 Ribu 610 Rupiah) atau 96,26% dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.997.515.390,00 (2 Milyar 997 Juta 515 Ribu 390 Rupiah) atau 93,51% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.735.693.725,00 (19 Milyar 735 Juta 693 Ribu 725 Rupiah) atau 97,17%.

Anggaran belanja tidak langsung pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seluruhnya dipergunakan belanja pegawai / personalia berupa gaji dan tunjangan baik anggota DPRD maupun pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung pos Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dibelanjakan untuk melaksanakan dan membiayai 6 program dengan 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten
Sampang

NO	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG			
A.	Belanja Tidak Langsung	25.336.450.425,00	24.301.289.000,00	95,91
	1. Pos DPRD	22.130.848.697,00	21.303.773.610,00	96,26
	2. Pos Sekretariat DPRD	3.205.601.728,00	2.997.515.390,00	93,51
B.	Belanja Langsung	20.309.011.750,00	19.735.693.725,00	97,17
	1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.167.243.350,00	3.968.801.858,00	95,23
	1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.381.413.750,00	1.254.159.737,00	90,79
	2. Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	297.209.600,00	292.098.835,00	98,28
	3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	2.488.620.000,00	2.422.543.286,00	97,34
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.360.856.000,00	3.334.452.623,00	99,21
	1. Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	224.700.000,00	213.028.000,00	94,81
	2. Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	2.601.300.000,00	2.594.739.123,00	99,75
	3. Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	335.806.000,00	328.094.500,00	97,70
	4. Pengadan Pakaian Dinas	199.050.000,00	198.591.000,00	99,77
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	236.600.000,00	218.450.700,00	92,33
	1. Kegiatan Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/seminar	236.600.000,00	218.450.700,00	92,33
	4 Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	29.070.000,00	19.665.000,00	94,93
	1. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	8.940.000,00	8.640.000,00	96,64
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	9.720.000,00	9.360.000,00	96,30
	3. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	10.410.000,00	1.665.000,00	15,99
	5 Program Fasilitasi persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.472.192.400,00	10.251.085.753,00	97,88
	1. Fasilitasi Rapat dan Risalah	1.422.690.000,00	1.415.130.000,00	99,47
	2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan	8.051.430.000,00	7.967.162.120,00	98,95
	3. Fasilitasi Layanan Aspirasi Masyarakat	998.072.400,00	868.793.633,00	87,05
	6 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2.043.050.000,00	1.943.237.791,00	95,11

1.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1.238.250.000,00	1.234.072.000,00	99,66
2.	Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	227.000.000,00	206.891.091,00	91,14
3.	Dokumentasi dan publikasi	577.800.000,00	502.274.700,00	86,93
JUMLAH		45.645.462.175,00	44.036.982.725,00	96,48

Dapat dilihat dari tabel pelaksanaan program dan kegiatan diatas bahwa sebagian besar realisasi kinerja program/kegiatan sangat baik dimana tercapai 90% atau lebih. Namun demikian ada beberapa realisasi program dan kegiatan yang belum mencapai target. Permasalahan dan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, sebagaimana uraian berikut :

a. Permasalahan

1. Program kegiatan Administrasi Umum (ADUM) yang sifatnya rutin ada 4 (empat) kegiatan yang tidak mencapai target yaitu :

- Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran Terealisasi 91.30 %,
- Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran Terealisasi 96.53 %,
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Terealisasi 96.53 %,
- Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Terealisasi 50.00 %

Hal ini disebabkan dalam penetapan perencanaan target dan anggaran mengacu pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik berupa kegiatan pameran, pawai dan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kegiatan Pameran dan Pawai dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Sampang tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi Covid-19 di tahun 2020, dikhawatirkan nantinya akan mengundang kerumunan masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat tetap terlaksana.

2. Program Fasilitasi persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Rapat dan Risalah Terealisasi 97.16 % dengan capaian pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi sebanyak 249 kali dari target 264 kali. Hal ini disebabkan dimasa pandemi covid anggota DPRD Kabupaten Sampang lebih selektif dan banyak melakukan efisiensi kegiatan yang mengundang banyak orang.

b. Solusi

1. Mengevaluasi dan merencanakan dengan baik dalam setiap penetapan anggaran dan target kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sampang khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan.

Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan. Dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 memuat 6 program dan 19 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

Kode Rekening	Tujuan /Sasaran Renstra 2019-2024	Urusan /Program /Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020			Target Kinerja Tahun 2021	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021	
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi a/d. Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Resnra
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12)=7+9+11	(13)=12/6*100
	Tujuan:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		1.	Nilai IKM Sekretariat DPRD		80	76,73	76	77,67	102,31	77	231,4	289,25
	Sasaran:												
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD		1	Nilai IKM Sekretariat DPRD		80	76,73	76	77,67	102,31	77	231,4	289,25
4.05.		NON URUSAN											
4,05,405,04,26,		Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi	%	100	91,93	100	97,16	97,16	-	189,09	189,09
			2	Persentase penyelesaian alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	%	100	75	100	100	100	-	175	175
			3	Persentase Fasilitasi Aspirasi yang terlayani	%	100	100	100	100	100	-	200	200
4,05,405,04,26,01		kegiatan fasilitasi rapat dan risalah DPRD	1	Jumlah Sidang Paripurna	Kali	245	48	49	44	100	-	92	37,55
			2	Jumlah rapat-rapat AKD	kali	2002	591	264	249	94,32	-	840	41,96

4,05,405,04,26,02		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan	1	Jumlah Bintek AKD	Kali	30	6	6	6	100	-	12	40,00
			2	Jumlah Study Banding AKD	kali	70	13	14	14	100	-	27	38,57
			3	Jumlah asuransi kesehatan Anggota DPRD	paket	5	1	1	1	100	-	2	40,00
4,05,405,04,26,03		Fasilitasi Jaring Aspirasi Masyarakat	1	Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat	Kali	15	2	3	3	100	-	5	33,33
			2	Jumlah Fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD	Kali	132	20	24	24	100	-	44	33,33
4,05,405,04,28,		Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1	Persentase perda yang difasilitasi	%	100	97,68	100	100	100	-	197,68	197,68
4,05,405,04,28,01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah fasilitasi penyusunan perda	Kali	29	3	4	4	100	-	7	24,14
			2	Jumlah sosialisasi Perda pada masyarakat	kali	29	9	0	0	0	-	9	31,03
4,05,405,04,28,02		Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	1	Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji	Kali	60	0	12	12	100	-	12	20,00
4,05,405,04,28,03		Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD	1	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	kali	720	99	144	144	100	-	243	33,75
4,05,405,04,28,04		Monitoring pilkada dan pelantikan pimpinan daerah	1	jumlah fasilitasi Anggota DPRD yang dilantik secara sah	Kali	45	45	0	0	0	-	45	100,00
4.01.4.01.01.01.		Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	96,25	100	93,80	93,80	-	190,05	190,05
4.01.4.01.01.01.01.		Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah surat terkirim	surat	32.500	4590	5000	1778	35,74	-	6368	19,59
			2	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bula n	72	12	12	12	100	-	24	33,33
			3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	180	28	30	30	100	-	58	32,22
			4	Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	ob	72	8	12	12	100	-	20	27,78
			5	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	ob	72	12	12	12	100	-	24	33,33
			6	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	maca m	54	9	9	8	80,89	-	17	31,48

			7	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	ok	4.090	420	420	420	100	-	840	20,54
			8	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman kegiatan	ok	9.400	1450	1450	1271	87,66	-	2721	28,95
			9	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman harian (pimpinan, Anggota DPRD dan Sekwan)	ok	73.548	12258	12258	12258	100	-	24516	33,33
			10	Jumlah Asuransi Gedung dan Kendaraan Pimpinan DPRD	bln	72	12	12	12	100	-	24	33,33
4.01.4.01.01.01.02.		Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1	Jumlah ATK	jenis	289	45	46	45	99,17	-	90	31,14
			2	Jumlah barang cetakan	jenis	6.510	1110	1020	1014	99,35	-	2124	32,63
			3	Jumlah barang penggandaan	lembar	999.800	178454	180.000	178829	99,35	-	357283	35,74
			4	Jumlah komponen instalasi listrik	jenis	140	25	25	24	99	-	49	35,00
			5	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	jenis	215	40	40	40	99,93	-	80	37,21
4.01.4.01.01.01.03.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1	Jumlah koordinasi dalam daerah	ok	5.706	1564	1042	927	88,96	-	2491	43,66
			2	Jumlah koordinasi luar daerah	ok	7.516	1562	1104	1084	98,19	-	2646	35,20
4.01.4.01.01.02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	-	200	200,00
4.01.4.01.01.02.01.		Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	1	0	0	0	0	-	0	0,00
			2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	30	6	6	6	100	-	12	40,00
4.01.4.01.01.02.02.		Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	1	Jumlah Rumah dinas yang dibangun	unit	-	0	0	0	0	-	0	0,00
			2	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara	unit	12	2	2	2	100	-	4	33,33
4.01.4.01.01.02.03.		Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	unit	1	2	0	0	0	-	2	200,00
			2	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	unit	4	0	0	0	0	-	0	0,00
			3	Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	unit	60	10	10	10	100	-	20	33,33

4.01.4.01.01.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	28	6	6	6	100	-	12	42,86
			2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit/ jenis	376	0	99	99	100	-	99	26,33
			3	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	12	5	3	3	100	-	8	66,67
			4	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	jenis	18	3	0	0	100	-	3	16,67
			5	Jumlah komputer yang diadakan	unit	12	5	1	1	100	-	6	50,00
			6	Jumlah printer yang diadakan	unit	8	0	0	0	0	-	0	0,00
			7	Jumlah meubelair yang diadakan	unit	6	0	0	0	0	-	0	0,00
			8	Jumlah meubelair yang dipelihara	unit	260	30	30	30	100	-	60	23,08
4.01.4.01.01.02.07.		Pengadaan Pakaian Dinas	1	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	stel	1.620	270	180	180	100	-	450	27,78
4.01.4.01.01.03.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100	100	100	100	100	-	200	200,00
4.01.4.01.01.03.01.		Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	1	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	ASN	67	10	10	10	100	-	20	29,85
4.01.4.01.01.04.		Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	1	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	100	100	100	83,33	83,33	-	183,33	183,33
4.01.4.01.01.04.01.		Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	dok	36	6	6	6	100	-	12	33,33
4.01.4.01.01.04.02.		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	24	4	4	4	100	-	8	33,33
4.01.4.01.01.04.03.		Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	Jumlah Dokumen SKM	dok	6	1	1	1	100	-	2	33,33
			2	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	6	1	2	0	0	-	1	16,67

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12)=7+9+11	(13)=12/6*100
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.02		EKRETARIAT DPRD										
4.02.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Renstra dan renja	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	0	0
4 02 01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA SKPD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	0
4 02 01 2.01 03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	0
4 02 01 2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA SKPD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	0
4 02 01 2.01 05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	0
4 02 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	0	0
4 02 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1	1
4 02 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- JUmlah Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	6
4 02 01 2.02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1728	914	914
4 02 01 2.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	0	0
4 02 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	0
4 02 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	0	0
4 02 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	lapo ran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		

4 02 01 2.03 02		Pengamanan Barang Milik Daerah		- Jumlah Barang Milik Daerah yang	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		
4 02 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	0
4 02 01 2.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang- undangan	ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	4	4
4 02 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	0
4 02 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	552	550	550
4 02 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1472	975	975
4 02 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang disediakan	Expl ar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	865	255	255
				Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	lemb ar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	113000	33367	33367
4 02 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Expl ar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	432	168	168
4 02 01 2.06 08		Fasilitas Kunjungan Tamu		- Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	ok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1440	301	301
4 02 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat	ok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	720	20	20
4 02 01 2.06 08				- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	ok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	32	3	3
4 02 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	1	1
4 02 01 2.07 02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional R2	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	6
4 02 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	0
4 02 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat yang terkirim	surat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5000	0	0
4 02 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	bula n	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	6
4 02 01 2.08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		- Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	132	66	66

			- Jumlah Honorarium Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	204		
			- Jumlah Honorarium Tenaga Administrasi Umum	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24		
			- Jumlah Honorarium Tenaga Caraka	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12		
			- Jumlah Honorarium Tenaga Keamanan DPRD	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	168		
			- Jumlah Honorarium Tenaga Operator Komputer	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12		
			- Jumlah Honorarium Tenaga Supir	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24		
4 02 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	0
4 02 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan yang dipelihara	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	2	2
			- Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1	1
4 02 01 2.09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10		
			- Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25		
4 02 01 2.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	102	0	0
4 02 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	gedung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	0	0
4 02 01 2.13		Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0	0
4 02 01 2.13 02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	0	0
			Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	0	0

4 02 01 2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 01 2.15 01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		- Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	540		
4 02 01 2.15 02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya DPRD	stell	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	225		
4 02 01 2.15 03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		- Jumlah Medical chek Up DPRD	oran g	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	45		
4 02 01 2.16		Layanan Administrasi DPRD		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 01 2.16 02		Fasilitasi Fraksi DPRD		- Jumlah Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	12		
4 02 01 2.16 03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		- Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	39		
4 02 01 2.16 04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		- Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	19.543		
4 02 02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	a	persentase pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yg difasilitasi;	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
			b	persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
			c	persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani;	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
			d	persentase perda yg di fasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.01 01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.01 02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		- Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	13		
4 02 02 2.01 03		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		- Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5		

4 02 02 2.01 04		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		- Jumlah Naskah Akademik		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5		
4 02 02 2.01 05		Penyusunan Tata Tertib DPRD		- Jumlah Dokumen Perubahan Tata Tertib DPRD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.02 01		Pembahasan KUA dan PPAS		- Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.02 02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		- Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.02 03		Pembahasan APBD		- Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.02 04		Pembahasan APBD Perubahan		- Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan APBD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.02 06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		- Jumlah laporan hasil rekomendasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.03 01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		"- Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		
4 02 02 2.03 02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		"- Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		
4 02 02 2.03 03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		"- Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		
4 02 02 2.03 04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		"- Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7		

4 02 02 2.03 06		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		- Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.03 08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		- Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.04 02		Bimbingan Teknis DPRD		- Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6		
4 02 02 2.04 03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan		- Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	108		
4 02 02 2.04 04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		- Jumlah Kelompok Pakar dan Tim ahli yang disediakan	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48		
4 02 02 2.04 05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		- Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	ob	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	144		
4 02 02 2.04 07		Penyusunan Program Kerja DPRD		- Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.05 01		Kunjungan Kerja dalam Daerah		- Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	34		
4 02 02 2.05 03		Pelaksanaan Reses		- Jumlah Fasilitasi Dengar Pendapat Aspirasi	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24		
				- Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3		
4 02 02 2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.06 01		Penyusunan Kode Etik DPRD		- Jumlah kode etik DPRD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.06 02		Pengawasan Kode Etik DPRD		- Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	dok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100		
4 02 02 2.08 01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		- Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6		

4 02 02 2.08 02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		- Jumlah Laporan Kinerja DPRD	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1		
4 02 02 2.08 03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		- Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	24		
4 02 02 2.08 04		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		- Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5		

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 telah sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 dan sebagian besar realisasi kinerja program/kegiatan tercapai diatas 90% atau lebih.
2. program dan kegiatan Renja Sekrtariat DPRD Tahun 2021 sudah tidak lagi sesuai dengan Renstra 20219-2024 karena Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk itu perlu dilakukan revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan untuk saran tindaklanjut.

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	Target Renstra Tahun 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Nilai IKM Sekretariat DPRD			-	75	76	77	78	76,73	77,67	77,80	78	Tercapai

Berdasarkan pada tabel di atas capaian kinerja terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sudah tercapai yaitu nilai IKM Sekretariat DPRD melebihi target yang ditetapkan sebesar 77.00 dengan realisasi sebesar 77.80 atau persentase capaian kinerja 101.03 % Atau katagori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indek tersebut dilakukan melalui metode penyebaran

kuesioner secara random kepada 30 Anggota DPRD sebagai responden pada saat jam kerja. Survey ini dilaksanakan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang meliputi :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme, prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Kewajaran Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi pelaksana Pelayanan
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan

Walaupun mendapatkan persepsi BAIK dari Anggota DPRD Kabupaten Sampang, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindaklanjut. Oleh karena itu disampaikan saran dalam membantu kinerja dan pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sampang, antara lain:

1. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima maka diperlukan komitmen yang kuat oleh pengambil keputusan dan pelaksana pelayanan publik untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas.
2. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan/berkesinambungan.
3. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.
4. Melaksanakan evaluasi secara berkala untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Sebagaimana termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
2. Kuantitas dan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD masih kurang memadai;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD belum Optimal;

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang sederhana dan prima;
- 3 Terjalannya hubungan yang harmonis antara sekretariat DPRD dengan DPRD
- 4 Pesatnya Perkembangan teknologi dan informasi.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daeah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				48.114.040.440	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				48.114.040.440
4.02.	SEKRETARIAT DPRD				48.114.040.440	SEKRETARIAT DPRD				48.114.040.440
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	31.936.965.440	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	31.936.965.440
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	36.399.622	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	36.399.622
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan renja	2 dokumen	7.212.182	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renstra dan renja	2 dokumen	7.212.182
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.805.482	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.805.482
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.830.968	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.830.968
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DKA SKPD	1 dokumen	3.807.967	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DKA SKPD	1 dokumen	3.807.967
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DKA SKPD	1 dokumen	3.820.770	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DKA SKPD	1 dokumen	3.820.770
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	3 dokumen	13.922.253	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	3 dokumen	13.922.253
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	3.665.594.405	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	3.665.594.405
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN	32 ASN	3.653.748.112	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN	32 ASN	3.653.748.112

4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	50 dokumen	3.232.203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	50 dokumen	3.232.203
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	2.619.960	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	2.619.960
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semeste	3 dokumen	5.994.130	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semeste	3 dokumen	5.994.130
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	91.808.200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	91.808.200
4 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	7 unit	91.808.200	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	7 unit	91.808.200
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	178.968.880	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	178.968.880
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 ok	178.968.880	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 ok	178.968.880
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	738.423.969	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	738.423.969
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	783 bh	49.307.662	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	783 bh	49.307.662
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	271 bh	140.996.270	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	271 bh	140.996.270
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	1728 bh	60.847.407	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	1728 bh	60.847.407
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	1020 jenis 150000 lemb	74.650.650	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	1020 jenis 150000 lemb	74.650.650
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	696 surat kabar	69.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	696 surat kabar	69.600.000
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	1440 ok	57.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	1440 ok	57.600.000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	720 ok 45 ok	285.421.980	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	720 ok 45 ok	285.421.980
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	152.980.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	152.980.000,00

4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	6 unit	152.980.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	6 unit	152.980.000
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	1.204.778.384,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	1.204.778.384,00
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang terkirim	5000 surat	32.018.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang terkirim	5000 surat	32.018.000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 bln	326.010.384	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 bln	326.010.384
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service Jumlah Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Tenaga Administrasi Umum Jumlah Tenaga Caraka Jumlah Tenaga Keamanan DPRD Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah Tenaga Supir	1 paket 17 orang 2 orang 1 orang 14 orang 1 orang 2 orang	846.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service Jumlah Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Tenaga Administrasi Umum Jumlah Tenaga Caraka Jumlah Tenaga Keamanan DPRD Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah Tenaga Supir	1 paket 17 orang 2 orang 1 orang 14 orang 1 orang 2 orang	846.750.000
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	906.297.443,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	906.297.443,00
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	5 unit 5 unit	368.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	5 unit 5 unit	368.600.000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	10 unit 25 unit	133.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	10 unit 25 unit	133.050.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	116 unit	54.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	116 unit	54.950.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan Kantor yang terpelihara	5 Gedung	349.697.443	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Bangunan Kantor yang terpelihara	5 Gedung	349.697.443

4 02 01 2.13	Penataan Organisasi		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	33.058.418	Penataan Organisasi		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	33.058.418
4 02 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen SKM Jumlah partisipasi pawai/pameran	1 dokumen 1 kl	33.058.418	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen SKM Jumlah partisipasi pawai/pameran	1 dokumen 1 kl	33.058.418
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	24.468.465.547	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	24.468.465.547
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	45 org	23.993.715.547	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	45 org	23.993.715.547
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya DPRD	225 stell	384.750.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya DPRD	225 stell	384.750.000
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Medical chek Up DPRD	45 orang	90.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Medical chek Up DPRD	45 orang	90.000.000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	460.190.572	Layanan Administrasi DPRD		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	460.190.572
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	12 kl	25.650.000	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	12 kl	25.650.000
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	73 kl	298.187.500	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	73 kl	298.187.500
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	19959 bh	136.353.072	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	19959 bh	136.353.072
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a) 100%, b) 100%, c) 100%, d) 100%	16.177.075.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a) 100%, b) 100%, c) 100%, d) 100%	16.177.075.000
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	2.185.974.223	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	2.185.974.223

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	138.573.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	138.573.000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	13 dokumen	1.458.828.223	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	13 dokumen	1.458.828.223
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	138.573.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	138.573.000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Naskah Akademik	6 dokumen	450.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Naskah Akademik	6 dokumen	450.000.000
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	1.920.435.313	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	1.920.435.313
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	1 dokumen	209.326.813	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	1 dokumen	209.326.813
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	1 dokumen	209.873.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	1 dokumen	209.873.500
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	1 dokumen	653.577.000	Pembahasan APBD		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	1 dokumen	653.577.000
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan APBD	1 dokumen	208.443.500	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan APBD	1 dokumen	208.443.500
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah laporan hasil rekomendasi Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 dokumen	639.214.500	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah laporan hasil rekomendasi Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 dokumen	639.214.500
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	100%	3.352.301.721	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	100%	3.352.301.721
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3 kl	790.903.221	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3 kl	790.903.221

4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 kl	765.783.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 kl	765.783.000
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 kl	816.671.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 kl	816.671.000
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 kl	780.541.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 kl	780.541.000
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	179.166.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	179.166.000
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	1 dokumen	19.237.500	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	1 dokumen	19.237.500
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	3.714.970.525	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	3.714.970.525
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	6 kl	2.583.298.150	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	6 kl	2.583.298.150
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	108 kl	697.419.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	108 kl	697.419.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	4 orang	121.200.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	4 orang	121.200.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	12 orang	288.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	12 orang	288.000.000
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	1 dokumen	25.053.375	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	1 dokumen	25.053.375
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun	100%	1.808.874.390	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun	100%	1.808.874.390
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	14 kecamata	290.500.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	14 kecamata	290.500.000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses		Jumlah Fasilitasi Dengar Pendapat Aspirasi Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	24 kl 3 kl	1.518.374.390	Pelaksanaan Reses		Jumlah Fasilitasi Dengar Pendapat Aspirasi Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	24 kl 3 kl	1.518.374.390

4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	573.231.778	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	573.231.778
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah kode etik DPRD yang disusun	1 dokumen	202.611.000	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah kode etik DPRD yang disusun	1 dokumen	202.611.000
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	370.620.778	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	370.620.778
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	2.621.287.050	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	2.621.287.050
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 kl	1.434.791.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 kl	1.434.791.000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	25.275.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	25.275.000
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 kl	434.578.500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 kl	434.578.500
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 kl	438.460.550	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 kl	438.460.550
5 02 02 2.08 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 kl	288.182.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 kl	288.182.000

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Sekretariat DPRD pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan mendukung pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dengan Tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Sekretariat DPRD sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Sampang
Prioritas Pembangunan 1: Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas Pembangunan 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomimelalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah
Prioritas Pembangunan 2: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Pembangunan 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan DayaSaing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan ketahanan sosial masyarakat melalui pengentaskanemiskinan, peningkatan pendidikan dan kesehatan serta sarana dan prasarana dasar
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untukMendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan Kemandirian Pangan danPengelolaan Sumber Daya Energi	Prioritas Pembangunan 2: Pemantapan pemulihan ekonomimelalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah

Prioritas Pembangunan 6: Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup	Prioritas Pembangunan 1: Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Prioritas Pembangunan 7: Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan inovasi daerah. dan Prioritas Pembangunan 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
	Tujuan:		
	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	78
	Sasaran:		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Nilai IKM Sekretariat DPRD	78

Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Sekretariat DPRD mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Sekretariat DPRD mendukung pada pencapaian **misi 4** yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu **Peningkatan kualitas pelayanan publik**. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

untuk mendukung pada sasaran tersebut, pada awalnya Sekretariat DPRD menyusun 6 (enam) Program yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
- Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan Pemetaan dan penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2019-2024 dan menjadi 2 (dua) Program yaitu :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 pada sistem aplikasi <https://sampangkab.sipd.kemendagri.go.id/>

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD mengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Program-program Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan “**Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi**” sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	5	6
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			48.114.040.440
4.02.	SEKRETARIAT DPRD			48.114.040.440
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	31.936.965.440
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	36.399.622
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan renja	2 dokumen	7.212.182
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.805.482
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.830.968
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DKA SKPD	1 dokumen	3.807.967
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA SKPD	1 dokumen	3.820.770
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	3 dokumen	13.922.253
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	3.665.594.405
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN	32 ASN	3.653.748.112
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	50 dokumen	3.232.203
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	2.619.960
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semeste	3 dokumen	5.994.130
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	91.808.200

4 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	7 unit	91.808.200
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	178.968.880
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 ok	178.968.880
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	738.423.969
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	783 bh	49.307.662
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	271 bh	140.996.270
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	1728 bh	60.847.407
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	1020 jenis 150000 lemb	74.650.650
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	696 surat kabar	69.600.000
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	1440 ok	57.600.000
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	720 ok 45 ok	285.421.980
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	152.980.000,00
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	6 unit	152.980.000
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	1.204.778.384,00
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	5000 surat	32.018.000
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 bln	326.010.384
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service Jumlah Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Tenaga Administrasi Umum Jumlah Tenaga Caraka Jumlah Tenaga Keamanan DPRD Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah Tenaga Supir	1 paket 17 orang 2 orang 1 orang 14 orang 1 orang 2 orang	846.750.000
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	906.297.443,00
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	5 unit 5 unit	368.600.000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	10 unit 25 unit	133.050.000
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	116 unit	54.950.000
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Kantor yang terpelihara	5 Gedung	349.697.443

4 02 01 2.13	Penataan Organisasi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	33.058.418
4 02 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen SKM Jumlah partisipasi pawai/pameran	1 dokumen 1 kl	33.058.418
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	24.468.465.547
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	45 org	23.993.715.547
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya DPRD	225 stell	384.750.000
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical chek Up DPRD	45 orang	90.000.000
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	460.190.572
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	12 kl	25.650.000
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	73 kl	298.187.500
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	19959 bh	136.353.072
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a) 100%, b) 100%, c) 100%, d) 100%	16.177.075.000
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100%	2.185.974.223
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	138.573.000
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	13 dokumen	1.458.828.223
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	138.573.000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	6 dokumen	450.000.000
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100%	1.920.435.313
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	1 dokumen	209.326.813
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	1 dokumen	209.873.500
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	1 dokumen	653.577.000
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan APBD	1 dokumen	208.443.500
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah laporan hasil rekomendasi Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 dokumen	639.214.500
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi	100%	3.352.301.721
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3 kl	790.903.221
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 kl	765.783.000

4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 kl	816.671.000
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 kl	780.541.000
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 dokumen	179.166.000
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	1 dokumen	19.237.500
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	3.714.970.525
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	6 kl	2.583.298.150
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	108 kl	697.419.000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	4 orang	121.200.000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	12 orang	288.000.000
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	1 dokumen	25.053.375
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun	100%	1.808.874.390
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	14 kecamatan	290.500.000
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitas Dengar Pendapat Aspirasi Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	24 kl 3 kl	1.518.374.390
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	573.231.778
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik DPRD yang disusun	1 dokumen	202.611.000
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	370.620.778
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100%	2.621.287.050
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 kl	1.434.791.000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	25.275.000
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24 kl	434.578.500
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 kl	438.460.550
5 02 02 2.08 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 kl	288.182.000

Pada Tahun 2022 Sekretariat DPRD akan melaksanakan **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** dengan Jumlah anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **48.114.040.440,- (48 Milyar 114 Juta 040 Ribu 440 Rupiah)** dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Sampang. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 2 program dan 18 kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat DPRD dan lingkup Kabupaten Sampang.

BAB V

P E N U T U P

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2021 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”** dan penjabaran dari tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**. Hasil evaluasi atas Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian kinerja program/kegiatan adalah 96,48 % atau dapat dikategorikan baik.

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Sekretariat DPRD adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”** yang didukung oleh satu sasaran yaitu : **Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang pada tahun 2021, pada awalnya disusun sebanyak 6 (Enam) program dan 19 (Sembilan Belas) Kegiatan. Namun dengan terbitnya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019, dilakukan beberapa penyesuaian sehingga tidak lagi sesuai dengan RENSTRA 2019-2024 dan menjadi 2 (dua) program dengan 18 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **48.114.040.440,- (48 Milyar 114 Juta 040 Ribu 440 Rupiah)** yang Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Sekretariat DPRD dan lingkup Kabupaten Sampang.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI



LAMPIRAN

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRDKABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	02	SEKRETARIAT DPRD											48,114,040,440		53,652,251,200			
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											31,936,965,440		31,965,884,872		
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											36,399,622		40,100,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Renstra dan renja	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	2 dokumen	100 %	7,212,182	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	7,950,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 dokumen	100 %	3,805,482	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,200,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 dokumen	100 %	3,830,968	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,200,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen DKA SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 dokumen	100 %	3,807,967	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,200,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perubahan DKA SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 dokumen	100 %	3,820,770	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	4,200,000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ dan SAKIP	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	3 dokumen	100 %	13,922,253	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	15,350,000
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,665,594,405		3,666,793,112	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	32 ASN	100 %	3,653,748,112	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	3,653,748,112
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	50 dokumen	100 %	3,232,203	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	3,555,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Akhir Tahun	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 dokumen	100 %	2,619,960	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	2,890,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	3 dokumen	100 %	5,994,130	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	6,600,000
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					91,808,200				91,808,200			
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	7 unit	100 %	91,808,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	91,808,200
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					178,968,880				197,000,000			
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	12 ok	100 %	178,968,880	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	197,000,000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					738,423,969				788,715,069			
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	783 bh	100 %	49,307,662	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	49,307,662
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	271 bh	100 %	140,996,270	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	162,500,000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1728 bh	100 %	60,847,407	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	60,847,407
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Barang Cetak Jumlah Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1020 jenis 150000 lembar	100 %	74,650,650	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	77,360,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	696 surat kabar	100 %	69,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	68,700,000
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Pemenuhan Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1440 ok	100 %	57,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	65,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	720 ok 45 ok	100 %	285,421,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	305,000,000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				152,980,000									0
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	6 unit	100 %	152,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	0
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,204,778,384									1,210,450,000
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Surat yang terkirim	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	5000 surat	100 %	32,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	32,500,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Pelayanan jasa Listrik, Air, Telepon dan Internet	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	12 bln	100 %	326,010,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	331,200,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Honorarium Jasa Cleaning service Jumlah Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Tenaga Administrasi Umum Jumlah Tenaga Caraka Jumlah Tenaga Keamanan DPRD Jumlah Tenaga Operator Komputer Jumlah Tenaga Supir	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 paket 17 orang 2 orang 1 orang 14 orang 1 orang 2 orang	100 %	846,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	846,750,000
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				906,297,443									913,710,131

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Sekwan dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	5 unit 5 unit	100 %	368,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	368,600,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dalam kondisi baik Jumlah Perpanjangan Pajak dan STNK Kendaraan Dinas Operasional	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	10 unit 25 unit	100 %	133,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	133,050,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam kondisi baik	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	116 unit	100 %	54,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	58,042,688
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Bangunan Kantor yang terpelihara	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	5 Gedung	100 %	349,697,443	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	354,017,443
4	02	01	2.13		Penataan Organisasi								33,058,418					33,058,418
4	02	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen SKM Jumlah partisipasi pawai/pameran	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	1 dokumen 1 kl	100 %	33,058,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	33,058,418
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								24,468,465,547					24,548,812,442
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	45 org	100 %	23,993,715,547	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	24,074,062,442
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	225 stell	100 %	384,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	384,750,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Medical check Up DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	45 orang	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	90,000,000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								460,190,572					475,437,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Rapat Fraksi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	12 kl	100 %	25,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	28,250,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	73 kl	100 %	298,187,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	298,187,500
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	100 %	19959 bh	100 %	136,353,072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100 %	149,000,000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							16,177,075,000			21,686,366,328			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							2,185,974,223			2,332,105,000			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	138,573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	190,855,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	13 dokumen	78 -	1,458,828,223			a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1,575,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan Hasil Kajian Perundang-Undangan	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	5 dokumen	78 -	138,573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	190,650,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Naskah Akademik	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	6 dokumen	78 -	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	375,000,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1,920,435,313				2,174,000,000
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan KUA & PPAS	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	209,326,813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	237,000,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan KUA & PPAS	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	209,873,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	237,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.02	03		Pembahasan APBD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan APBD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	653,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	720,000,000
4	02	02	2.02	04		Pembahasan APBD Perubahan	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan rekomendasi hasil pembahasan perubahan APBD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	208,443,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	235,000,000
4	02	02	2.02	06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan hasil rekomendasi Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	639,214,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	745,000,000
4	02	02	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								3,352,301,721					4,917,342,000
4	02	02	2.03	01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	3 kl	78 -	790,903,221	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	870,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	3 kl	78 -	765,783,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	795,000,000
4	02	02	2.03	03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	3 kl	78 -	816,671,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	895,000,000
4	02	02	2.03	04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	3 kl	78 -	780,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	870,000,000
4	02	02	2.03	06		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Laporan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	179,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	954,035,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah laporan hasil rekomendasi LKPJ Bupati	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	19,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	533,307,000	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								3,714,970,525				4,057,034,500	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Bintek DPRD yang diikuti	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	6 kl	78 -	2,583,298,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	2,888,734,500	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Media yang mempublikasikan Kegiatan DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	108 kl	78 -	697,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	731,500,000	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	4 orang	78 -	121,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	121,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.04	05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dan Pimpinan yang disediakan	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	12 orang	78 -	288,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	288,000,000
4	02	02	2.04	07		Penyusunan Program Kerja DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang disusun	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	25,053,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	27,600,000
4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								1,808,874,390					1,972,544,390
4	02	02	2.05	01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	14 kecamatan	78 -	290,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	454,170,000
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Dengar Pendapat Aspirasi Jumlah pelaksanaan RESES DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	24 kl 3 kl	78 -	1,518,374,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1,518,374,390
4	02	02	2.06			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								573,231,778					1,175,584,938

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
											Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
																Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah kode etik DPRD yang disusun	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	202,611,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	804,964,160						
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	370,620,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	370,620,778						
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								2,621,287,050					5,057,755,500						
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	4 kl	78 -	1,434,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	2,970,000,000						
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Kab. Sampang, Gunung Sekar	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 dokumen	78 -	25,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	27,900,000						

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	24 kl	78 -	434,578,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	538,698,500
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	4 kl	78 -	438,460,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	567,122,000
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Nilai IKM Sekretariat DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	1 kl	78 -	288,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		a) Persentase pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi; b) Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD; c) Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang terlayani; d) Persentase pembentukan perda yang difasilitasi	a)100; b)100; c)100; d) 100 a)% ; b) %; c) %; d) %	954,035,000
TOTAL									48,114,040,440					53,652,251,200